



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB. WAY  
KANAN



DIGITAL GOVERNMENT  
**SPBE SUMMIT**  
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana

NIP. 197208081996032001

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

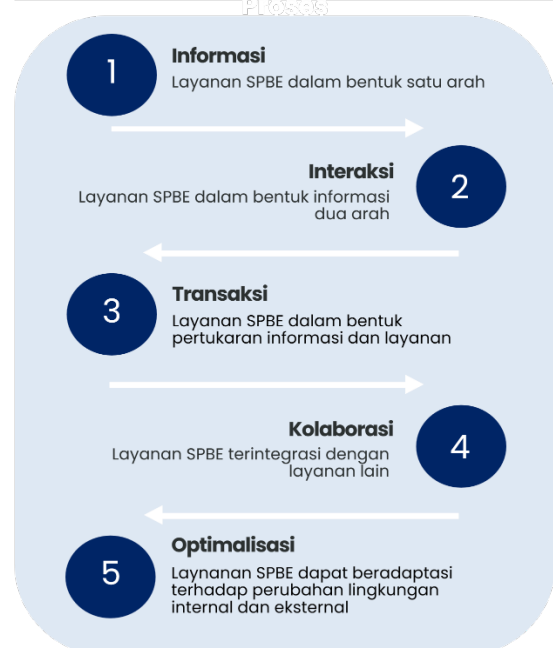
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

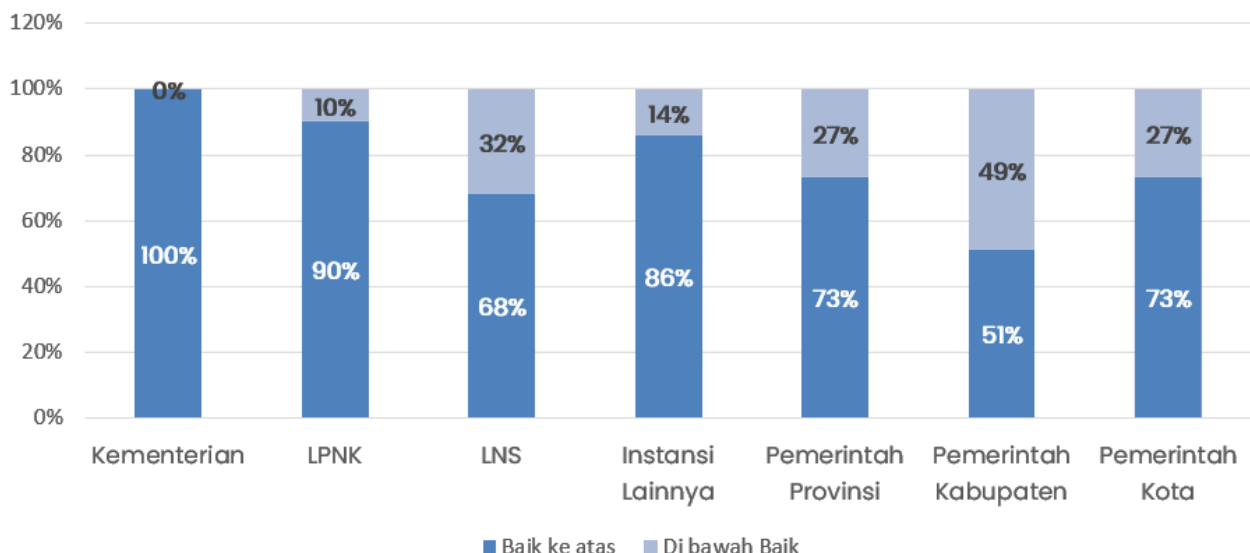


# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

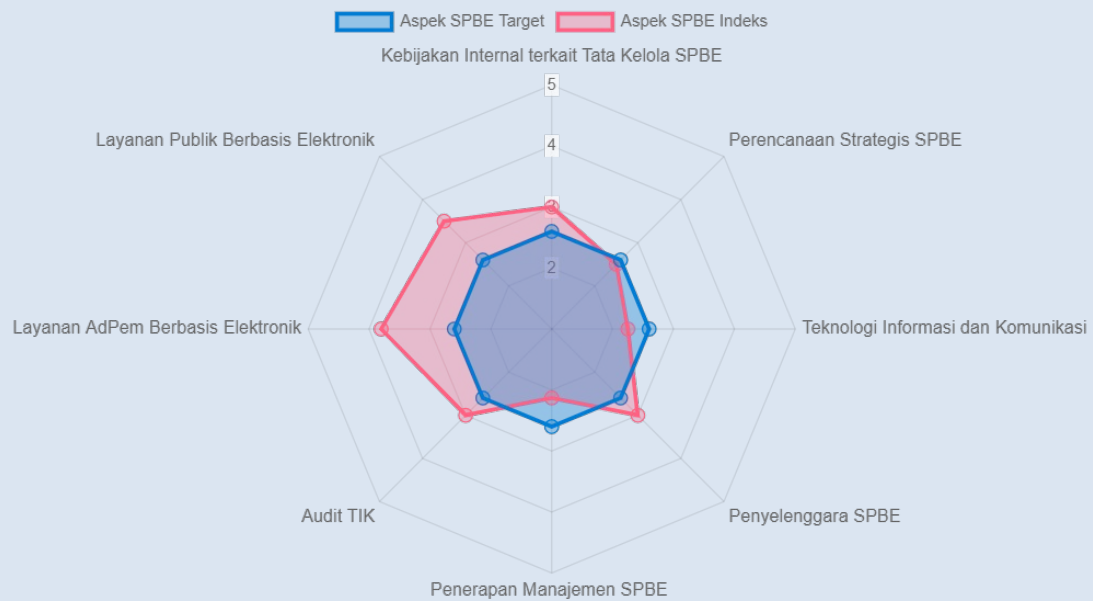
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	<b>2,79</b>	<b>3,66</b>	<b>3,40</b>	<b>2,95</b>	<b>3,01</b>	<b>2,59</b>	<b>2,50</b>
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>2,91</b>	<b>3,63</b>	<b>3,47</b>	<b>3,06</b>	<b>3,17</b>	<b>2,72</b>	<b>3,20</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,27</b>	<b>3,42</b>	<b>3,02</b>	<b>2,66</b>	<b>2,56</b>	<b>2,01</b>	<b>2,54</b>
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,65</b>	<b>2,53</b>	<b>2,31</b>	<b>1,98</b>	<b>1,81</b>	<b>1,45</b>	<b>1,82</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,45</b>	<b>4,21</b>	<b>3,99</b>	<b>3,43</b>	<b>3,64</b>	<b>3,28</b>	<b>3,67</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

**Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023**



## Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
<b>SPBE</b>	<b>3,08</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	2,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	2,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,13
<i>Audit TIK</i>	3,00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	3,68
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50

## KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Way Kanan adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE (semua Indikator dipenuhi).

- Kekuatan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan adanya Arsitektur, Peta Rencana, Keterpaduan Rencana dan Anggaran, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan  
Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memiliki memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE serta belum didokumentasikan secara formal, juga belum memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan Pencanaan penerapan SPBE.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan  
Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum melaksanakan (atau mendokumentasikan) Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan tahapan SDLC, belum menyediakan Layanan Jaringan Intra yang mencakup semua unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dan belum menerapkan sistem penghubung layanan berbasis API dan mencakup seluruh unit kerja.

### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan adanya Tim Koordinasi dan Kolaborasi Penersapan SPBE.

- Kekuatan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Manajemen SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan  
Pemerintah Kabupaten Way Kanan melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE masih pada tingkat terkelola: telah dilaksanakan berdasarkan

perencanaan Manajemen SPBE yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun belum menggunakan pedoman yang berlaku serta hanya diterapkan pada sebagian ruang lingkup.

#### F. Audit TIK

Pemenuhan Aspek: Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan SPBE.

- Kekuatan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kekuatan.
- Kelemahan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan adanya layanan SPBE di bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan SPBE di bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pengawasan Internal terkait Pemerintah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Layanan Perencanaan dan Penganggaran menggunakan aplikasi SIPD. Layanan Keuangan menggunakan aplikasi SIPD dan SIMDA. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan aplikasi LPSE, Layanan Kepegawaian menggunakan aplikasi SIKEP, Layanan Kearsipan menggunakan aplikasi SRIKANDI, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menggunakan aplikasi SIMBADA dan SIMASET, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah menggunakan aplikasi SIPP
- Kelemahan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan adanya layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektoral 1, Publik Sektoral 2, dan Publik Sektoral 3.

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektoral 1 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan SP4N-LAPOR dan Jaga.ID. Layanan JDIH menggunakan aplikasi JDIH. Sedangkan Layanan Publik Sektoral 1 menggunakan aplikasi OSS dan SiCantik.
- Kelemahan  
Tidak terdapat Indikator yang menjadi kelemahan.

## REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintahan Kabupaten Way Kanan, sudah dapat menggambarkan predikat SANGAT BAIK dalam penerapan SPBE sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Way Kanan adalah pada penerapan Aspek Layanan, baik layanan untuk administrasi Pemerintahan maupun layanan publik. Keunggulan ini terlihat dengan dari pemanfaatan banyak aplikasi umum berbagi pakai yang disupport oleh Pemerintah Pusat. Layanan Perencanaan dan Penganggaran menggunakan aplikasi SIPD. Layanan Keuangan menggunakan aplikasi SIPD dan SIMDA. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan aplikasi LPSE, Layanan Kepegawaian menggunakan aplikasi SIKEP, Layanan Kearsipan menggunakan aplikasi SRIKANDI, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menggunakan aplikasi SIMBADA dan SIMASET, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah menggunakan aplikasi SIPP.

Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan masih belum mampu menerapkan SPBE secara definitif pada Aspek perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Penerapan Manajemen SPBE. Ketidaksiapan penerapan SPBE pada Aspek Perencanaan Strategis, terutama dalam pembuatan dan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE akan mempengaruhi penerapan SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan lebih-lebih lagi pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE.

Penerapan SPBE pada aspek layanan sangat diapresiasi, namun perbaikan pada aspek Perencanaan merupakan pekerjaan mendesak yang akan sangat mempengaruhi penerapan pada Aspek lain, terutama Manajemen SPBE. Kami menyarankan agar Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang komprehensif dapat segera diselesaikan. Kolaborasi antara pakar SPBE di Perguruan Tinggi dengan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Way Kanan akan menghadirkan dokumen acuan/referensi dan pegangan yang berkualitas dapat penerapan SPBE. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE harus diperkuat oleh kebijakan Internal yang sudah bagus namun diperlukan review. Penerapan Layanan SPBE, terutama untuk layanan Publik harus dimotivasi oleh Peta Rencana SPBE.



## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3